

**FUNGSI KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
DALAM MENGELOLA DANA PADA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
PERDESAAN**

**(Studi Kasus : Kelompok SPP Dahlia Jorong Sangkak Puyuh Nagari Aia
Batumbuh Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)**

OLEH

MEIDAL FITRA
05115010



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**FUNGSI KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DALAM
MENGELOLA DANA PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN**
(Studi Kasus : Kelompok SPP Dahlia Jorong Sangkak Puyuh Nagari Aia Batumbuk
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok)

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya harapan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia seiring peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan oleh Pemerintah mulai tahun 2007. Salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang seluruh anggotanya berasal dari kaum perempuan.

Penelitian ini mengkaji salah satu kelompok masyarakat Pada PNPM Mandiri Perdesaan yaitu kelompok SPP dilihat dari fungsi, kemampuan dan Permasalahan kelompok dalam mengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan. Subyek dalam penelitian ini adalah Kelompok SPP Dahlia Jorong Sangkak Puyuh Kec. Gunung Talang Kab. Solok. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, untuk pengambilan sampel dilakukan dengan sensus sebanyak 26 orang responden.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah fungsi kelompok dari segi aturan main dalam kelompok sudah berfungsi, seluruh anggota kelompok mengetahui informasi mengenai aturan – aturan yang ada didalam kelompok, namun dalam menjalankan aturan anggota kelompok belum berfungsi maksimal, ini terlihat dari jumlah kehadiran pertemuan kelompok yang semakin lama semakin menurun. Kemampuan kelompok dalam mengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan sudah baik, tingkat pengembalian pinjaman kelompok ke pihak PNPM berada pada tingkat Kolektibilitas A (I) atau lancar dan diberikannya penghargaan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan kepada kelompok. Sedangkan permasalahan program dalam kegiatan kelompok SPP adalah jumlah kehadiran kelompok yang menurun dan masih minimnya bimbingan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan, untuk prinsip PNPM Mandiri Perdesaan sudah mulai merujuk prinsip Grameen Bank yaitu sudah memfokuskan pinjaman kepada pihak perempuan.

Untuk lebih menunjang kegiatan kelompok SPP dalam mengelola dana PNPM diharapkan agar adanya motivasi dan bimbingan dari pihak PNPM Mandiri Perdesaan kepada kelompok, dan dapat meminimalkan kelemahan yang masih terdapat didalam kelompok seperti sistem pengelolaan yang belum memperhatikan prinsip – prinsip keorganisasian, belum memiliki AD/ART, tidak memiliki aturan dan sanksi tertulis, dan diharapkan dapat mengoptimalkan kelebihan yang sudah ada (modal sosial) didalam kelompok agar dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi kelompok yang mandiri.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1997 Indonesia dilanda oleh badai krisis, yang meluas menjadi krisis ekonomi dan krisis politik. Dengan adanya krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi membawa dampak yang tidak diinginkan, dapat dilihat pada tahun tersebut banyaknya pekerja – pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga keadaan tersebut menyebabkan ledakan pengangguran. Rahim (2001) menyebutkan, badai krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi dan politik di Indonesia, keadaan ini menguncang dasar perekonomian nasional yang berakibat merosotnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan maupun akses kepada pendidikan dan kesehatan. Keadaan ini menyebabkan jumlah penduduk berada dibawah garis kemiskinan mengalami peningkatan .

Sejalan dengan ledakan penduduk sebagai dampak dari krisis ekonomi dan politik, pemerintah telah mengambil suatu langkah kebijakan dan langkah operasional dalam bentuk pelaksanaan program padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja baik yang bersifat khusus maupun sektoral. Sejak 1998 – 1999, pemerintah menggelar program yang populer dikenal dengan nama Jaring Pengaman Sosial (JPS) (Rahim, 2001).

Perluasan JPS dan pemberdayaan masyarakat meliputi perluasan Prasarana Pedesaan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT – AS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM–DKE), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Penanggulangan Pengangguran Tenaga Kerja Terampil (P3T), Program Padat Karya Kehutanan, Program Padat Karya Sektoral Ciptaan Karya, dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (Rahim, 2001).

Harapan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di indonesia muncul kembali seiring peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan oleh

Pemerintah mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri ini dirumuskan kembali mekanisme penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka diharapkan bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Tim Kornas, 2008). PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 1998 yang selama ini dinilai berhasil Pelaksanaannya (Tim Kornas, 2008).

Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (Tim Kornas, 2008).

Usulan yang didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi, kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat, kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan masyarakat, kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal, dan penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).

PNPM Mandiri Perdesaan di Sumatera Barat telah dimulai sejak tahun 2008 yang merupakan lanjutan dari program PPK yang dilaksanakan pada 12 Kabupaten (Lampiran 1). Di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok PNPM Mandiri Perdesaan juga dilaksanakan pada tahun 2008 dimana Kecamatan Gunung Talang adalah salah satu Kecamatan yang tidak didasari dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), tetapi Kecamatan Gunung Talang adalah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kelompok SPP, mengetahui kemampuan kelompok SPP serta mendeskripsikan Permasalahan program PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatan dan keberlanjutan kelompok SPP. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fungsi kelompok SPP dalam mengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatan simpan pinjam dilihat dari segi aturan main didalam kelompok sudah berfungsi ini terlihat dari informasi anggota kelompok yang mengetahui aturan – aturan yang ada di kelompok seperti jenis – jenis simpanan beserta jumlah yang harus dibayar setiap bulannya kepada pengurus kelompok, dari segi stuktur kepengurusan masing – masing pengurus mengetahui peran dan tugasnya didalam kelompok sehingga kelompok dapat terus berdiri dan dari segi menjalankan sangsi dan aturan kelompok belum berfungsi maksimal, terlihat dari pertemuan rutin kelompok jumlah anggota kelompok yang hadir semakin lama – semakin menurun, namun tanggungjawab sebagai anggota kelompok SPP dalam pembayaran pinjaman tidak dilupakan.
2. Kemampuan kelompok SPP dalam Mengelola Dana PNPM Mandiri sudah cukup baik ini terbukti dengan tingkat pengembalian dana pinjaman kepada pihak PNPM tidak mengalami tunggakan, selain itu kelompok SPP Dahlia tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran kepada pihak PNPM, dilihat dari tingkat pengembalian kelompok SPP Dahlia berada pada tingkat Kolektibilitas A(I) atau lancar. Atas usaha dan kinerja yang dilibatkan kelompok SPP Dahlia pihak PNPM Mandiri Perdesaan memberikan Piagam penghargaan kepada pengurus kelompok.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan SPP pada Program PNPM Mandiri Perdesaan yaitu rendahnya kemauan kelompok didalam menjalankan aturan dari segi pertemuan kelompok, kurangnya bimbingan dari

DAFTAR PUSTAKA

- Alamghir dan Elhaut.1994. *Empowering The Rural Poors For Self Help*. IFAIDS Primary Objective Dalam Agricultural – Rural Development. Volume I No.1/1994. Frankrut. Germany
- Andrison, Salmi.1998. *Kinerja Usaha Masyarakat Penerima Dana Program Inpres Desa Tertinggal Sungai Kalu II dan Desa Tertinggal Pintu Kayu Gadang Kec. PWK Pakan Rabaa Sungai Pagu Kab. Solok*. Skripsi Fakultas Pertanian Unand. Padang
- Asnawi, Sofian.1993. *Aspek Sosial Ekonomi dalam Pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal (IDT) Sumatera Barat*. Makalah Seminar dan Kongres Ikatan Keluarga Alumni Unand. Padang
- Astrid, S. Susanto.1984. *Sosialisasi Pembangunan*. Bina Cipta. Bandung
- Bappenas.1993. *Panduan Desa Tertinggal*. Badan Pembangunan Nasional. Jakarta
- Beratha, I.N.1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Binaro, R.1983. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia
- BPS.2003. *Indeks Kemiskinan*. Biro Pusat Statistik. Jakarta
- Bauman.P.J.1982. *Sosiologi Fundamental*. Djambatan. Jakarta
- Eaton. J.W (ed).1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*. UI Press. Jakarta
- Faisal, Kasyrino.1994. *Prospek Pengembangan Ekonomi Perdesaan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Firdaus, L.M.1997. *Pengembangan Potensi Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Biak Num For Irian Jaya*. Jurnal Analisis CSIS Tahun XXVI No. 1 Januari – Februari 1997
- Helmi.1997. *Pengelolaan Irigasi dan Sumberdaya Air yang Berorientasi Efisien dan Pemberdayaan Ekonomi Petani Beberapa Pemikiran tentang Penyesuaian Kelembagaan Petani*. Pusat Studi Irigasi Unand. Padang
- Israel, Arturo.1990. *Pengembangan Kelembagaan*. Pengalaman proyek – proyek Bank Dunia. LP3ES. Jakarta
- Karlson, Gunnar Alder.1995. *Kebijaksanaan Untuk Menghapus Kemiskinan di Masa Depan dalam Ala (1995)*. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Liberty. Yogyakarta
- Kartasmita, Ginanjar.1996. *Kemiskinan*. Balai Pustaka. Jakarta
- Kartonegoro, Sentoso.1994. *Manajemen Organisasi*. Widya Press. Jakarta